

Pola Rekrutmen Partai PDIP Dalam Menetapkan Kandidat Calon DPRD Tingkat 1 Sumatra Selatan

Obrial Panggi Titale¹, Amaliatulwalidain², Isabella³

^{1,2,3}Universitas Indo Global Mandiri

Email Korespondensi: obrialpanggititale@gmail.com

Abstrak: Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik terlebih di negara yang menganut demokrasi, jika partai politik gagal melakukan fungsi rekrutmen politik maka akan berhenti menjadi partai politik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis dan temuan di lapangan yaitu bahwa terdapat dua mekanisme rekrutmen partai PDIP dalam menetapkan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan yakni terbuka dan tertutup. Mekanisme ini merupakan proses dalam melakukan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen legislatif yang dilaksanakan PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pola kandidat dalam rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan yaitu Compartmentalization, dalam rekrutmen politik latar belakang pendidikan seorang calon legislatif tidak menjamin kesiapan mereka terjun ke dunia politik tanpa adanya pembekalan khusus dari partai politik. Immediate Survival, dalam proses rekrutmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kedekatan personal masih menyisakan kesenjangan di antara kader, walaupun tidak menimbulkan konflik yang keras. Partisan, rekrutmen juga dilakukan oleh DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode infiltrasi yaitu masuk ke dalam elemen-elemen atau organisasi-organisasi masyarakat. Meritokrasi, PDIP Provinsi Sumatera Selatan dalam proses rekrutmen politiknya menggunakan sistem karir dan meritokrasi dimana para kader untuk menjadi elit politik harus memulai jenjang karir sesuai dengan mekanisme yang ada di tubuh partai.

Kata Kunci: Rekrutmen, Partai Politik dan Calon Legislatif

Abstract: Political recruitment is a very important function for political parties, especially in countries that embrace democracy, if political parties fail to carry out political recruitment functions, they will stop being political parties. The purpose of this research is to find out the pattern of PDIP party recruitment in determining candidates for DPRD Level 1 of South Sumatra Province. The results of the analysis and findings in the field are that there are two PDIP party recruitment mechanisms in determining candidates for DPRD Level 1 of South Sumatra Province, namely open and closed. This mechanism is a process in carrying out the party's function as a means of legislative recruitment carried out by PDIP South Sumatra Province. The candidate pattern in the recruitment of the PDIP party in determining candidates for DPRD Level 1 of South Sumatra Province is Compartmentalization, in political recruitment the educational background of a legislative candidate does not guarantee their readiness to enter politics without special provision from political parties. Immediate Survival, in the process of recruiting PDIP legislative candidates for South Sumatra Province related to personal closeness still leaves gaps between cadres, although it does not cause violent conflict. Partisan, recruitment is also carried out by DPD PDIP South Sumatra Province by using the infiltration method, namely entering into elements or community organizations. Meritocracy, PDIP South Sumatra Province in its political recruitment process uses a career system and meritocracy where cadres to become political elites must start a career path according to the existing mechanisms in the party body.

Keywords: Recruitment, Political Parties and Legislative Candidates

Article History :

Received 27-02-2025; Revised 30-03-2025; Accepted 24-04-2025

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Fungsi rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, jika melihat pendapat tersebut maka sudah seharusnya partai politik melakukan cara yang baik dalam proses penjurangan kader khususnya kader-kader yang dipersiapkan untuk menduduki kursi anggota legislatif atau anggota DPR ini (Prasetya, 2021).

Partai politik di negara demokrasi yang memiliki fungsi beberapa diantaranya adalah rekrutmen politik, setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Pentingnya fungsi legislatif yang didalamnya diisi oleh orang-orang partai politik maka dari itu partai politik dituntut untuk merekrut kader-kader yang berkompeten untuk dipersiapkan di kursi parlemen atau bisa disebut kursi wakil rakyat yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rekrutmen kader adalah salah satu hal utama bagi partai politik, pola rekrutmen kader yang bagus dan memiliki cara-cara yang elegan akan memberikan dampak yang positif bagi partai politik itu sendiri, kader-kader tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan partai politik itu sendiri, apabila didalam sebuah partai politik itu pola rekrutmen kadernya tidak berjalan semestinya atau terdapat kesalahan yang tidak semestinya, maka bisa dipastikan dampak negatif akan menimpa partai politik tersebut, partai politik tersebut bisa dipastikan akan gagal dalam proses persaingan antar kompetitor partai politik dan mungkin bisa membubar sendiri (Sugiarto dan Pratiwi, 2020).

Partai politik dalam kehidupan bernegara juga menjadi sarana utama sebagai representasi sebuah aspirasi dan kepentingan yang berbentuk parlemen, sistem demokrasi harus memiliki pemisahan kekuasaan, kekuasaan dipisah menjadi tiga yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif yang dikhususkan membuat hukum, eksekutif yang berfungsi menjalankan administrasi pemerintahan dan yudikatif memiliki tugas diperadilan. Jika merujuk kepada pendapat tersebut maka legislatif yang direpresentasikan sebagai parlemen adalah poin yang penting dalam sistem politik demokrasi yang dianut suatu negara. Anggota legislatif sendiri didalamnya diisi oleh orang-orang partai politik yang mewakili masyarakat dari masing-masing partai politik itu sendiri (Nasution, 2023).

Partai politik yang besar di Indonesia sekarang ini adalah contoh dan bukti nyata dari keberhasilan pola rekrutmen kader, sehingga partai politik tersebut terus hidup dan berkembang didalam sebuah negara. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik terlebih di negara yang menganut demokrasi, jika partai politik gagal melakukan fungsi rekrut politik maka akan berhenti menjadi partai politik. Fungsi rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian (Adelina, 2018).

Keberadaan partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral dan etika untuk memperbaiki keadaan dan kondisi masyarakat, tetapi sementara banyak partai politik dapat membangun daya saing, hanya sedikit yang dapat tetap kompetitif secara berkelanjutan atau langgeng. Kelemahan utama adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan dan menghasilkan keunggulan kompetitif dan membawanya ke generasi berikutnya atau yang bisa disebut kelahiran kembali. Dalam konteks rekrutmen partai politik ada sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi (Nugroho, 2023).

Pertama, sistem pemilihan umum proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen. Elit partai di daerah sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen, yang menentukan siapa yang bakal menduduki “nomor pertama”. *Kedua*, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. *Ketiga*, dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi (*linkage*) yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. *Keempat*, proses pemilihan dan proses rekrutmen bekerja dalam konteks “massa mengambang” yang kurang terdidik dan kritis. Dalam jangka yang cukup panjang masyarakat Indonesia tidak memperoleh pendidikan politik secara sehat sehingga menghasilkan jutaan pemilih tradisional yang sangat rentan dengan praktik-praktik

mobilisasi (*mobilized voters*). Gejala-gejala diatas merupakan problem yang rumit dalam rekrutmen politik menuju tatanan politik demokratis di parlemen (DPR dan DPRD), terutama terjadi dalam rekrutmen calon legislatif ditingkat lokal (Budiharjo, 2020).

Kelemahan lain dari proses rekrutmen politik partai adalah tidak semua persyaratan pencalonan anggota parlemen dikomunikasikan secara umum. Selama ini persyaratan keanggotaan legislatif yang ditetapkan oleh masing-masing partai hanya dikomunikasikan ditingkat pimpinan partai, sehingga mayoritas caleg dipilih oleh mereka yang memegang jabatan di dalam partai. Tuntutan ini harus disosialisasikan dengan berbagai cara, seperti brosur, poster dan media massa, seperti halnya bisnis mencari pekerja.

Berdasarkan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Partai PDIP

Tingkat 1 Dapil 3 Sumatera Selatan

Tahun 2024-2029 memberikan gambaran hasil suara sah dari berbagai calon yang bertarung dalam pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten OKI- OI, khususnya di Dapil 3. Calon Ilyas Panji Alam. Dari partai PDIP menempati posisi pertama dengan 29.652 suara sah, menjadikanya salah satu pemenang di Pilkada 2024-2029. Partai PDIP pada Pileg 2024, mendapatkan 543.067 suara atau sebesar 10,97 persen. Berikut partai yang berpeluang mendapatkan 8 kursi DPRD Sumsel, berdasarkan perolehan suara masing-masing partai. Golkar, 749,720 suara, Gerindra, 716,413suara. Nasdem, 526,214 suara. Demokrat, 518,680 suara. PKB, 478,691 suara. Nasdem, 37.950 suara. Golkar, 37.868. PKS, 37.248 suara. PKB, 35.043 suara. PAN, 411,711 suara. PKS, 387,487 suara. Dengan mengantongi suara 543,067 suara partai PDIP berpeluang mendapatkan sembilan kursi wakil rakyat.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai pendekatan dalam menggali data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk pemilihan subyek pada penelitian ini dengan mengkhususkan pada subjek yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu anggota legislatif (1 orang), Ketua Partai DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan (1 orang), kader partai (1 orang) dan masyarakat atau partisipan (2 orang). Analisis data yang diambil dalam penelitian ini dimana dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan dianalisis dengan mereleksikan pola rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan.

PEMBAHASAN

PDIP adalah kekuatan politik baru yang lahir dengan tekad mengakhiri sengkarut politik hari ini dengan mengembalikan politik kepada nilainya yang luhur. Dengan lebih mengfokuskan kepada masyarakat untuk bersama memberikan kontribusi yang maksimal untuk Indonesia. Adapaun beberapa hal yang ingin diperangi PDIP yaitu korupsi yang merajalela dikalangan pejabat pemerintahan dan sikap intoleran yang semakin hari semakin menjadi masalah di Indonesia. Dengan tekad yang kuat PDIP dalam memperjuangkan tujuannya sangat membutuhkan partisipasi dari kalangan anak muda yang dinilai memiliki gagasan yang baru dan semangat yang masih membara untuk perubahan. Salah satu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP yang menjadi obyek penelitian adalah DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait pola rekrutmen calon legislatifnya dengan pendekatan teori dan hasil wawancara dengan pihak partai.

- a. Dari hasil wawancara dengan ketiga orang yang terlibat langsung dalam proses rekrutmen Calon Legislatif DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan diatas dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan adalah pola rekrutmen terbuka dengan memberikan kebebasan kepada siapapun yang ingin bergabung atau menjadi calon legislatif dari DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan dan hal ini pun dilakukan baik dari PDIP Pusat dan PDIP Daerah karena memang secara umum PDIP adalah partai yang terbuka untuk masyarakat
- b. Terkait pola rekrutmen politik yang dilakukan DPD PDIP Provinsi Sumatera dapat disimpulkan

bahwa DPD PDIP Provinsi Sumatera bahkan PDIP secara umum menggunakan pola rekrutmen terbuka dalam proses rekrutmennya dengan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara khususnya di Provinsi Sumatera Selatan yang ingin terlibat dan menjadi calon legislatif dari DPD PDIP Provinsi Sumatera tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya dan tidak menggunakan pola rekrutmen tertutup karena memang pola rekrutmen tertutup tidak sejalan dengan prinsip kepemimpinan PDIP Provinsi Sumatera itu sendiri dimana pola tertutup hanya akan menguntungkan segelintir elit saja.

Adapun beberapa pertimbangan Partai PDIP Provinsi Sumatera Selatan dalam pola rekrutmen kandidat partai PDIP dalam menentukan calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

a. *Compartmentalization*

Dalam proses rekrutmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait kriteria pendidikan dalam rekrutmen tidak begitu dispesifikan bagi lulusan-lulusan ilmu politik akan tetapi selama ia memiliki ijazah SMA atau sederajat bisa diartikan calon tersebut telah lulus berkas dalam wilayah pendidikan, selebihnya pihak partai melakukan pendidikan politik khusus untuk calon-calon legislatif yang telah lulus berkas demi memberi bekal untuk kedepannya bagi calon legislatif dari PDIP Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam proses rekrutmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait kriteria dibidang politik dan organisasi merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh PDIP Provinsi Sumatera Selatan dalam merekrut calon legislatifnya dikarenakan penerimaan masyarakatlah yang sangat penting ketika ingin terjun ke dunia politik sebab dalam pemilu mendatang yang memilih adalah masyarakat dan yang akan diwakili adalah masyarakat pula dan salah satu cara menganalisa akseptabilitas bakal calon legislatif yang mendaftarkan diri adalah mengetahui pengalamannya baik itu latar belakang pendidikan sampai dengan pengalaman organisasi yang dimiliki bakal calon, maka wajar pada saat ini PDIP lebih mengfokuskan keanggotaan serta calon legislatifnya yang paham dengan fenomena-fenomena yang dihadapi masyarakat pada saat ini.

b. *Immediate Survival*

Dalam proses rekrutmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kedekatan personal masih menyisakan kesenjangan di antara kader, walaupun tidak menimbulkan konflik yang keras. Tetapi, hal itu menandakan bahwa proses kaderisasi juga mengalami kemacetan sehingga partai masih memberikan ruang terhadap kalangan non-partai untuk berpartisipasi dalam agenda politik. Bisa dikatakan partai juga mulai menyadari bahwa kualitas kader yang dibangun dengan metode kaderisasi di setiap tingkat juga belum mampu secara kompetitif bersaing dengan kalangan lulusan akademisi non politik.

Dalam proses rekrutmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait kriteria kedekatan personal masih menyisakan kesenjangan di antara kader, walaupun tidak menimbulkan konflik yang keras dan anggota legislatif mempunyai tugas untuk menerima aspirasi rakyat dan semaksimal mungkin mencoba memberikan solusi terkait permasalahan yang diajukan masyarakat. Kapasitas anggota legislatif tidak diragukan dalam hal menyikapi masalah-masalah yang ada, hanya saja masih ada oknum yang selalu menyalahgunakan wewenang yang telah diamanahkan kepada mereka demi kepentingan sendiri. DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi patokan utama dalam menjaring calon legislatif dalam internal partai politik. DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan menilai loyalitas dan dedikasi terhadap partai sangat penting.

c. *Partisipan*

Rekrutmen juga dilakukan oleh DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode infiltrasi yaitu masuk ke dalam elemen-elemen atau organisasi-organisasi masyarakat. Hal tersebut legal dilaksanakan, selama sebatas dan seaspirasi sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar (AD) PDIP, dimana partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang sebatas dan seaspirasi dapat menempatkan anggota partai pada organisasi-organisasi tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa partisipan politik dalam PDIP beberapa calon legislatif yang berada di organisasi masyarakat juga melakukan perekrutan pada anggota organisasi tersebut, seperti yang dilakukan oleh beberapa kader partai di organisasi. Sosialisasi kepada masyarakat oleh PDIP Provinsi Sumatera Selatan juga dilakukan dengan terjun langsung. Sosialisasi ini mempunyai tujuan mendapat

dukungan masyarakat sekaligus dukungan kepada aktifitas masyarakat yang positif agar tetap eksis dan produktif.

d. Meritokrasi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa landasan karir politik dalam PDIP adalah keanggotaan dan partisipasi aktif. Individu bergabung dengan partai dan terlibat dalam berbagai kegiatan partai, seperti menghadiri pertemuan, menjadi sukarelawan, berkampanye dan berkontribusi dalam diskusi kebijakan. Keterlibatan aktif membantu anggota membangun jaringan, menunjukkan komitmen, dan menampilkan potensi mereka.

Selain itu, pola rekrutmen PDIP dengan cara meritokratis dan karir, maka posisi dan peluang untuk maju seorang calon kader dan kader didasarkan pada keterampilan, keahlian, dan kontribusi anggota yang ditunjukkan kepada partai. Meritokrasi itu sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang cakap naik ke posisi kepemimpinan, mendorong pengambilan keputusan yang efektif dan tata kelola partai. Ini mendorong persaingan yang adil dan memungkinkan anggota berbakat untuk berkontribusi dan unggul dalam struktur partai.

Berdasarkan Peraturan Partai PDI Perjuangan Nomor 25A tentang rekrutmen dan seleksi calon legislatif DPRD Tingkat 1 Partai PDIP Provinsi Sumatera Selatan ada beberapa proses rekrutmen penetapan untuk calon DPRD PDI Perjuangan yaitu sebagai berikut :

a. Proses penjangkaran

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa proses awal dalam rekrutmen anggota DPRD Tingkat 1 adalah penjangkaran, yaitu DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan membuka ruang pendaftaran bagi siapapun baik dari internal partai ataupun masyarakat umum untuk dapat mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif DPRD Tingkat 1 Partai PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Mekanisme penjangkaran ini tentunya setiap anggota atau kader partai berhak mendaftarkan diri dengan mengambil formulir pendaftaran di Kantor DPD calon legislatif DPRD Tingkat 1 Partai PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Setiap anggota atau kader partai yang sebelumnya telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran. Maka seseorang yang akan menjadi bakal calon anggota legislatif dari PDIP harus mengikuti dalam tahapan seleksi calon setelah seluruh ketentuan administrasi sudah terpenuhi.

Proses rekrutmen menjadi fokus bagi partai dengan berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kader dari bakal calon legislatif yang melibatkan seluruh elemen tokoh masyarakat. Dalam serangkaian proses tersebut ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi bagi pendaftar, yaitu meliputi :

- 1) Pengisian formulir pendaftaran dengan melampirkan daftar riwayat hidup, dan KTA (bagi yang merupakan anggota partai).

- 2) Pelaksanaan ujian tertulis dan psikotes, untuk ujian dan psikotes ada dua tahapan yaitu yang pertama diselenggarakan oleh DPD dan yang kedua oleh DPP PDIP.
- 3) Mengikuti sekolah partai, setelah dinyatakan lolos administrasi, ujian tertulis dan psikotes pendaftar akan mengikuti tahap selanjutnya yaitu bagi pendaftar di PDIP wajib mengikuti sekolah partai yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

Adapun tugas yang dilakukan tim verifikasi dalam mekanisme proses rekrutmen yang dijalankan adalah sebagai berikut:

- 1) Verifikasi administrasi terhadap bakal calon guna memenuhi ketentuan tentang persyaratan bakal calon legislatif DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan psikotes sesuai dengan instruksi DPP Partai.
- 3) Verifikasi bobot skoring bakal calon.

Data-data yang diperlukan dalam proses pendaftaran digunakan sebagai sarana dalam proses penyaringan oleh DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan.

b. Proses Penyaringan

Dasar penilaian pada tahap penjangkaran dan penyaringan dilaksanakan melalui proses dengan tahapan telah ditentukan berdasarkan Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor: SKR.PP/061/TAP/DPP/III/2019 tentang Pedoman Teknis Penjangkaran, Penyaringan, dan Penetapan Calon Anggota Legislatif PDIP. DPD PDIP sangat menghargai juknis yang ditetapkan oleh DPP dengan mempertimbangkan dan memprioritaskan kuota pada pengurus internal (inti) sebesar 85%. Dari hasil penyaringan DPP Partai harus memastikan dalam memenuhi minimal 30% untuk jumlah perempuan dari jumlah kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Setelah itu barulah para calon disebar ke daerah pemilihan masing-masing. Selanjutnya bakal calon anggota legislatif yang telah ditetapkan melalui proses penyaringan dinyatakan sebagai calon anggota DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan atau disebut sebagai usulan Daftar Calon Sementara (DCS). Dari ketentuan usulan DCS DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus disampaikan oleh DPD Partai dan DPP Partai.

c. Proses Penugasan dan Penetapan Dari proses penugasan ini, calon

anggota legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang masuk dalam DCS Partai mendapatkan tugas untuk melakukan sosialisasi diri, penggalangan dan pemetaan politik di daerah pemilihan yang bersangkutan. Hal ini penting dilakukan bagi para calon untuk memperkenalkan diri ke masyarakat secara langsung, karena semakin sering mensosialisasikan diri kemasyarakat akan memiliki peluang yang besar dalam memenangkan diri sebagai calon legislatif.

d. Penetapan Nomor urut

Penetapan nomor urut calon dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas calon di dalam melaksanakan tugas-tuganya sebagai calon anggota legislatif. Dengan demikian Caleg yang memiliki kualitas lebih, dapat menempati nomor urut prioritas di dalam suatu daerah pemilihan. Contohnya ketua partai, sekretaris dan bendahara DPD Partai hanya mendapatkan hak untuk ditempatkan pada nomor prioritas dalam hal ini seluruh ketentuan di dalam penjangkaran dan penyaringan dapat dipenuhi. Proses penetapan harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh PDIP tidak membedakan-jabatan atau kedudukan sebagai calon anggota legislatif. Kriteria untuk menetapkan calon antara lain yaitu :

- 1) Faktor usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 21 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia merupakan hal yang

penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat

- 2) Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal sarjana agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua mekanisme rekrutmen partai PDIP dalam menetapkan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan yakni terbuka dan tertutup. Mekanisme ini merupakan proses dalam melakukan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen legislatif yang dilaksanakan PDIP Provinsi Sumatera Selatan. Adapun pola kandidat dalam rekrutmen partai PDIP dalam menentukan kandidat calon DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- a. *Compartmentalization*, dalam rekrutmen politik latar belakang pendidikan seorang calon legislatif tidak menjamin kesiapan mereka terjun ke dunia politik tanpa adanya pembekalan khusus dari partai politik terkait pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik itu sendiri, dalam kriteria pendidikan yang ada di PDIP tidaklah begitu memperdulikan latar belakang pendidikan calon legislatifnya akan tetapi mereka diwajibkan mengikuti sekolah partai dari PDIP guna menjadi bekal dalam kesiapan menghadapi pemilu yang akan datang.
- b. *Immediate Survival*, dalam proses rekrutmen calon legislatif PDIP Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan kedekatan personal masih menyisakan kesenjangan di antara kader, walaupun tidak menimbulkan konflik yang keras. Tetapi, hal itu menandakan bahwa proses kaderisasi juga mengalami kemacetan sehingga partai masih memberikan ruang terhadap kalangan non-partai untuk berpartisipasi dalam agenda politik. Bisa dikatakan partai juga mulai menyadari bahwa kualitas kader yang dibina dengan metode kaderisasi di setiap tingkat juga belum mampu secara kompetitif bersaing dengan kalangan lulusan akademisi non politik.
- c. Partisan, rekrutmen juga dilakukan oleh DPD PDIP Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode infiltrasi yaitu masuk ke dalam elemen-elemen atau organisasi-organisasi masyarakat. Hal tersebut legal dilaksanakan, selama sebatas dan seinspirasi sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar (AD) PDIP, di mana partai dalam membangun dan menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi fungsional, dan organisasi profesi yang sebatas dan seinspirasi dapat menempatkan anggota partai pada organisasi-organisasi tersebut.
- d. Meritokrasi, PDIP Provinsi Sumatera Selatan dalam proses rekrutmen politiknya menggunakan sistem karir dan meritokrasi dimana para kader untuk menjadi elit politik harus memulai jenjang karir sesuai dengan mekanisme yang ada di tubuh partai. Hal itu dilakukan agar para kader mempunyai pengalaman dan pengetahuan dari dasar tentang partai dan perpolitikan. Sistem karir dan meritokrasi ini sudah sesuai dengan kondisi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat heterogen karena banyaknya suku dan ras yang menetap di Provinsi Sumatera Selatan sehingga memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendaftar sebagai kader dan elite politik PDIP Provinsi Sumatera Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina. (2018). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshari, I., & Fadiyah, D. (2019). Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus: Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional Kota Bekasi Dalam Menetapkan Calon Anggota Legislatif DPR RI Tahun 2014-2019). *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 4(2), 18-35.
- Basrowi dan Suwandi. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta

- Budiharjo. (2020). Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4703-4715.
- Cipto, Bambang. (2016). *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyani, D. A., & Al Jannah, D. (2022). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Pemilu 2019. *Journal Of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 8(1).
- Gebby, Rizkiani, (2023). *Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Oleh Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Partai Keadilan Sejahtera Di Kabupaten Ciamis)* (Skripsi, Universitas Siliwangi).
- Haris, Syamsudin. (2015). *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI Perss.
- Harjanto, N. (2018). Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia. *Analisis CSIS*, 40(2), 138-159.
- Kesuma, S. (2015). Rekrutmen Politik Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Pekanbaru Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau JOM FISIP*, 2(2).
- Komala, D. A. (2020). *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2019 Di Yogyakarta (Studi Kasus: Partai Solidaritas Indonesia)* (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).
- Lutfi, Sigit, (2016), *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Mohtar Mas'oe'd, C. M. (2020). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Musthofa, M. (2023). Analisis Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang Selatan Pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(1), 99-110.
- Nasution, F. A. (2023). *Hukum Tata Negara*. Palembang: Sinar Grafika.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Octabrian, H. H., & Putri, I. A. (2022). Rekrutmen Bakal Calon Legislatif Partai Solidaritas Indonesia Dpw Sumatera Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Suara Politik*, 1(2).
- Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetya, I. Y. (2021). Pergeseran peran ideologi dalam partai politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 30-40.
- Prasojo, T. A. (2013). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019. *Politika*, 4(2).
- Rizki, D. K. (2017). Pola Rekrutmen Partai Nasional Demokrat pada Pencalonan Anggota Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Jombang. *Jurnal Politik Muda*, 6(1), 67-72.
- Rudy, Teuku May. (2013). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Refika.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*. PT. Jakrata: Raja Grafindo Persada.

- Saherimiko, S., & Usmulyadi, S. U. (2020). Proses rekrutmen calon legislatif tahun 2019 partai demokrat di dewan pimpinan cabang kota pontianak. *Aspirasi, Jurnal Ilmu Politik*, 8(3).
- Silalahi, M., Marpaung, P., Panjaitan, D.T. M. R., & Da'o, B. (2020). Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo pada Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Utara. *Jurnal Governance Opinion*, 4(2), 130-149.
- Subakti, Ramlan. (2019). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Sugiarto, S., & Pratiwi, W. (2020). Sistem pemilihan internal partai dalam menentukan kandidat legislatif yang demokratis dan berintegritas. *Majalah Keadilan*, 20(1), 1-19.
- Sutopo. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sutoro, Arbi. (2014). *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Steven, W. P. P. (2023). *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Pada Dpc Partai Pdi Kabupaten Lampung Selatan Di Pemilu 2024* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung).
- Tanjung, Nurfitriana. (2024). *Pola Rekrutmen Calon Legislatif Pdi Perjuangan Dalam Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019* (Skripsi, Universitas Andalas).
- Tika, W. (2022). *Implementasi Pola Rekrutmen Anggota Partai Politik Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di DPW Partai NasDem Bandar Lampung)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Todapa, A. Z. (2022). *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah* (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.